



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN  
PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA TORONGREJO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

**RIAN SELAMET MUHAJIR**

NPM. 21701091099



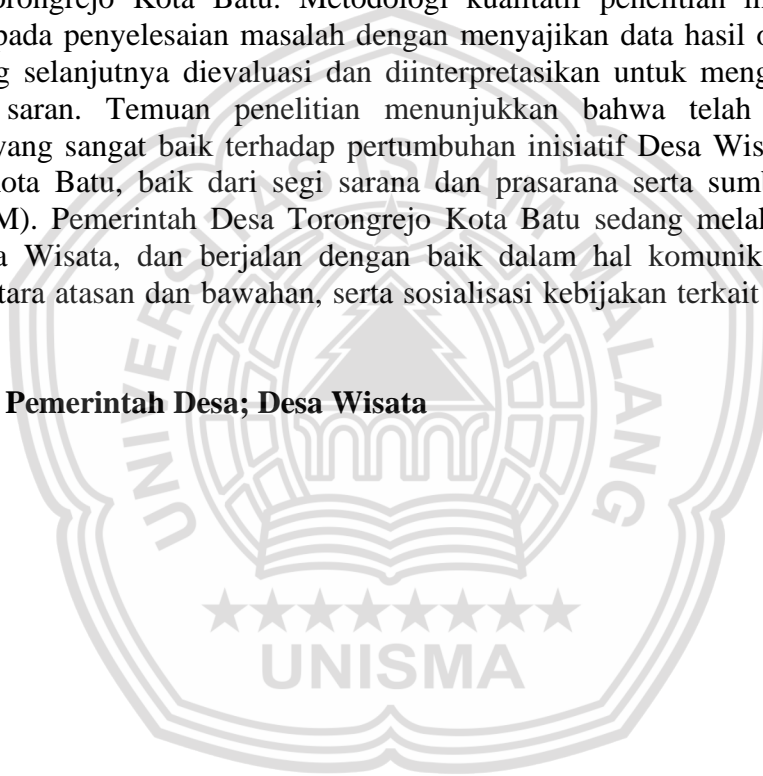
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2024**

## ABSTRAK

Rian Selamat Muhajir, 21701091099, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Peran Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Di Desa, Dosen Pembimbing Dr. Nurul Umi Ati, M. AP dan Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M. AP

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan pemerintah desa di Desa Torongrejo Kota Batu dalam menjalankan inisiatif Desa Wisata. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan, penelitian dilakukan di kantor Kelurahan Torongrejo Kota Batu. Metodologi kualitatif penelitian ini sangat menekankan pada penyelesaian masalah dengan menyajikan data hasil observasi lapangan yang selanjutnya dievaluasi dan diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan dan saran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat perencanaan yang sangat baik terhadap pertumbuhan inisiatif Desa Wisata Desa Torongrejo Kota Batu, baik dari segi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM). Pemerintah Desa Torongrejo Kota Batu sedang melaksanakan program Desa Wisata, dan berjalan dengan baik dalam hal komunikasi antar organisasi, antara atasan dan bawahan, serta sosialisasi kebijakan terkait program tersebut.

**Kata Kunci : Pemerintah Desa; Desa Wisata**

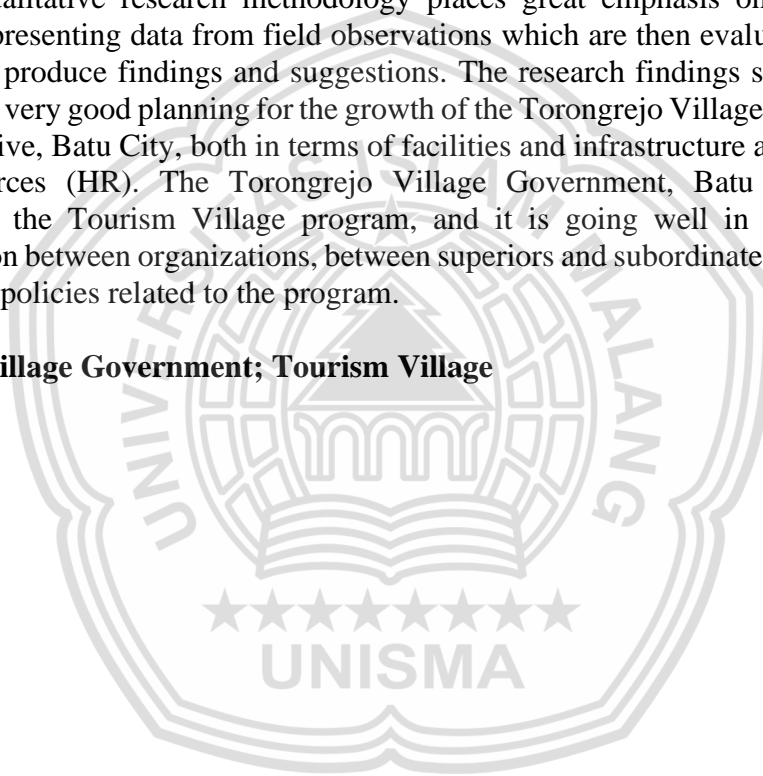


## ABSTRACT

Rian Selamat Muhajir, 21701091099, *Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Role of Village Government in Planning Tourism Village Development in Villages, Supervisor Dr. Nurul Umi Ati, M. AP and Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M. AP*

The aim of this research is to find out how involved the village government in Torongrejo Village, Batu City is in carrying out the Tourism Village initiative. Qualitative descriptive methods were used in this research. To collect the necessary data or information, research was carried out at the Torongrejo Village office, Batu City. This qualitative research methodology places great emphasis on solving problems by presenting data from field observations which are then evaluated and interpreted to produce findings and suggestions. The research findings show that there has been very good planning for the growth of the Torongrejo Village Tourism Village initiative, Batu City, both in terms of facilities and infrastructure as well as human resources (HR). The Torongrejo Village Government, Batu City, is implementing the Tourism Village program, and it is going well in terms of communication between organizations, between superiors and subordinates, as well as socializing policies related to the program.

**Keywords: Village Government; Tourism Village**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Konteks Penelitian

Desa merupakan perwujudan kesatuan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi suatu wilayah. Sedangkan desa adalah kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa rumah tangga yang hidup dalam sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam sistem politik Indonesia, pemerintahan desa memimpin pemerintahan daerah yang mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan melakukan perubahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat sebagai organisasi pelayanan publik. Untuk memupuk tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan reputasi pemerintahan desa, pegawai pemerintah harus mencapai konsensus mengenai arah dan sudut pandang yang dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengelola dan melaksanakan tugas operasional di seluruh domain dan struktur organisasi.

Di Indonesia, Kepala Desa bertugas mengurus urusan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemerintahan. Pimpinan satuan organisasi mempunyai peranan strategis dalam mengarahkan, membimbing, dan mendorong pegawai agar melaksanakan tugas sesuai dengan lini organisasi agar pelayanan publik dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Setiap satuan organisasi pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila pimpinan masing-masing unit organisasi menjalankan kepemimpinan yang efektif dan efisien maka hal tersebut dapat tercapai.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan lebih kepada desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan inisiatif pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat setempat. Ada kewajiban besar yang sejalan dengan peran besar ini. Dengan demikian, agar seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pemerintah desa harus memasukkan konsep akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Desa, termasuk desa bersejarah atau nama lainnya, diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1. Berdasarkan prakarsa masyarakat serta hak asasi dan tradisional yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur pemerintahan Indonesia, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Pasal 1 Ayat 2, Pemerintah Desa bertugas mengurus kepentingan masyarakat setempat dan pemerintahan dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa atau seseorang yang dekat dengan namanya didukung oleh perangkat desa.

Dengan kekuasaan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Desa berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan tingkat desa. Menurut UU Desa,

masyarakat merupakan fokus pembangunan, dan pemerintahan supra desa berfungsi sebagai saluran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Pemerintahan di atas desa harus siap menghadapi dampak buruk dari penerapan ide-ide ini. Desa yang dikembangkan tidak lagi menjadi beban pemerintah federal, provinsi, atau lokal; justru menjadi lembaga yang mengedepankan misi negara dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kedaulatan negara (Kurniawan, 2015). Oleh karena itu, tujuan pembangunan desa haruslah memberdayakan masyarakat lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan khususnya dalam mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih baik. Sejarah negara ini menunjukkan kesulitan yang dihadapi desa dalam menerapkan gagasan negara kesejahteraan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan pemerintahan negara. Saat ini desa mendapat dana yang cukup besar serta kemampuan dan kewenangan dalam menguasai wilayahnya. Wilopo (2015:460) mengatakan bahwa kreativitas, semangat kewirausahaan, dan teknologi baru merupakan aspek krusial untuk mempercepat kemajuan. Inovasi tidak hanya mencakup hal-hal baru tetapi juga pendekatan inventif terhadap tugas-tugas tradisional. Melalui acara Young Entrepreneur in Village yang memberikan pelatihan dan pembinaan kepada generasi muda mengenai peluang usaha sesuai potensi desanya, Amerika dan China menjadi contoh negara yang berhasil menciptakan inovasi di desanya.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata disertakan, seperti administrasi tujuan dan atraksi wisata serta perusahaan terkait (Fandeli, 2001:37). Menurut definisi yang berbeda (UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata), pariwisata adalah serangkaian kegiatan wisata yang didukung oleh sumber daya dan bantuan dari pemerintah daerah, negara bagian, federal, dan wirausaha.

Penciptaan desa wisata merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, Pasal 29. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, pengembangan desa wisata ini melibatkan masyarakat desa dan didukung oleh pemerintah desa melalui pemberdayaan masyarakat. Dusun mandiri yang memiliki potensi lokal yang dapat menyediakan berbagai daya tarik wisata tanpa memerlukan investor disebut sebagai desa wisata. Oleh karena itu, setiap kabupaten harus merencanakan pengembangan desa wisata guna meningkatkan pendapatan daerah dan menggali potensi daerah. Sebab, pembentukan desa wisata merupakan salah satu komponen pelaksanaan otonomi daerah (UU No. 22/99).

Sebagian besar masyarakat Desa Torongrejo yang dikelilingi masyarakat sekitar dan memiliki kekayaan potensi sumber daya alam serta udara bersih sebagian besar adalah petani. Pengetahuan lokal dan adat istiadat Jawa masih dipraktekkan di desa ini. Pemerintah Desa Torongrejo dan pemuda desa bergotong royong membangun objek wisata ini dalam rangka inisiatif pemerintah untuk mengembangkan desa wisata.

## 1.2. Permasalahan

Hasil dan pembahasan penelitian ini akan menjawab sejumlah permasalahan yang telah diangkat dalam konteks dan uraian yang diberikan oleh para peneliti sebelumnya:

1. Apa peran Pemerintah Desa dalam merencanakan pengembangan desa wisata di Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung peran Pemerintah Desa dalam merencanakan pengembangan desa wisata di Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat peran Pemerintah Desa dalam merencanakan pengembangan desa wisata di Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi pemerintah desa dalam perencanaan pengembangan desa wisata berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan peneliti.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman ide dan konsep yang tercakup dalam perkuliahan serta penerapan praktisnya. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap ilmu administrasi negara menjadi tujuan lain penelitian ini, khususnya terkait keterlibatan pemerintah dalam pengembangan desa wisata di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.



Penelitian ini diyakini akan meningkatkan tingkat pengetahuan dan partisipasi warga Desa Torongrejo dalam rencana pengembangan Desa Wisata. Masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber teori dalam merencanakan pembangunan desa wisata di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.



## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pengembangan Desa Wisata di Desa Torongrejo Kota Batu” yang berpijak pada teori penilaian kebijakan Sugiyono (2020:57).

- Implementasi Program: Sesuai dengan tujuan dan kriteria, program desa wisata telah berjalan dengan sukses. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program di Desa Torongrejo telah memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan diikuti oleh perangkat desa.
- Penganggaran: Alokasi anggaran pemerintah desa berjalan sesuai rencana. Namun untuk membangun dusun wisata agropolitan dibutuhkan biaya yang besar sehingga dibutuhkan pihak lain seperti investor.
- Reaksi Masyarakat: Menurut penelitian, belum ada reaksi yang baik dari masyarakat terhadap usulan resor wisata. Beberapa orang antusias dengan program ini, namun secara keseluruhan, program ini tidak diterima dengan baik.
- Penolakan Masyarakat: Sejumlah organisasi masyarakat menyuarakan penolakannya terhadap rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah desa.
- Membandingkan Peran Pemerintah Desa: Sejauh mana realisasi peran pemerintah dalam membangun resor wisata ini dijelaskan oleh tolok ukur dalam teori ini.
- Tujuan Program: Tujuan Program Desa Wisata adalah untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat Desa Torongrejo yang sebagian besar mengandalkan pendapatan dari kebun dan sawah.

## 6.2. Saran

Temuan-temuan investigasi memungkinkan rekomendasi-rekomendasi berikut ini:

1. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat, artinyadiharapkan mengambil peran yang lebih aktif dalam mendukung inisiatif desa wisata dan akan menyadari manfaat dari implementasinya. Setelah program terlaksana dengan baik, program desa wisata tidak hanya memberikan manfaat bagi pembangunan desa tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
2. Bantuan dari Pemerintah Daerah dan Perizinan, dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih fokus pada perizinan dan prosedur pendukung dalam melaksanakan pengembangan desa wisata. Mengingat bahwa program desa wisata merupakan inisiatif pemerintah daerah, maka diharapkan dengan adanya dukungan yang lebih baik program ini akan mencapai hasil yang maksimal dan sukses.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adipandang.Wordpress.Comjatim.Bpk.Go.Id  
Dokumjdih.Jatimprov.Go.Idjurnal.Unigal.Ac.Id  
Eprints.Itn.Ac.I
- Analysisamethods Sourcebookedition* ,United Stated Of Amerika:Sage Publication
- Anik Widiastuti, Program Studi Pendidikan Ips Fis Uny, Indonesia Anissa Siti Nurhayati, Program Studi Pendidikan Ips Fis Uny, Indonesia Model Pengembangan Desa Wisata Kampung Majapahit (Studi
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Pt. Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edisi Pertama Malang : Intrapublishing Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok :
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata Ngangring Sleman
- Hayat. (2018:82). *Buku Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi)*.
- Hayat. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro*. Edisi Pertama. Jakarta : Prenamada Group
- <https://Kotabatu.Net/Torongrejo/Profil-Wilayah-Desa-Torongrejo/>
- Kabupaten Ende ( Studi Kasus Pada Balai Taman Nasional KelimutuKabupaten Ende ) Novira Susani , Nurul Umi Ati , Hayat
- Kasus Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto)
- Khoirul Muafi, *Nurul Umi Ati, Agus Zainal Abidin Pengembangan Objek*
- Pt Raja Grafindo Persada Hayat, Daris. 2018. *Kemandirian Desa*. Edisi Pertama. Malang : Intelegensia Media
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cv. Miles, M.B, Huberman,A.M, Dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data*

Undang –Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Wisata Taman Nasional Kelimutu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

